

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK

Siti Musyarofah

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura

Tri Agustin

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak: *Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang besarnya dapat dikendalikan oleh daerah yang bersangkutan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan setting studi kasus yang dilaksanakan di pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik selama lima periode (2002 – 2006). Alat untuk menghitung efisiensi adalah biaya pemungutan dibanding realisasi penerimaan sedangkan alat untuk menghitung efektivitas adalah realisasi penerimaan dibanding target penerimaan.*

Hasil analisis data menunjukkan tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah tingkat efisiensi tahun 2002 sebesar 0,15 atau 15% mengalami kenaikan hingga tahun 2004 sebesar 0,12 atau 12%, kemudian tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 0,16 atau 16%, dan tahun 2006 mengalami kenaikan lagi menjadi 0,15 atau 15%. Tingkat efisiensi rata-rata pertahunnya adalah 0,14 atau 14%, yang menunjukkan tingkat efisiensi secara rata-rata terletak pada tingkat yang sangat efisien. Sedangkan tingkat efektivitas dari pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah tingkat efektivitas tahun 2002 sebesar 1,01 atau 101% mengalami kenaikan hingga tahun 2004 sebesar 1,12 atau 112%, kemudian tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 1,04 atau 104%, dan tahun 2006 mengalami kenaikan lagi menjadi 1,29 atau 129%, karena target tahun 2006 sama dengan target 2005. Sedangkan tingkat efektivitas rata-rata pertahunnya adalah 1,11 atau 111%, yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas secara rata-rata terletak pada tingkat yang sangat efektif.

Kata kunci: *efisiensi, efektivitas, retribusi pasar*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Retribusi pasar kabupaten di banyak daerah tingkat kabupaten/ kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan PAD yang cukup berarti. Retribusi pasar

akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah tingkat kabupaten/ kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mengelola 31 jenis retribusi daerah, salah satu diantaranya adalah retribusi pasar. Data statistik kabupaten Gresik menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan realisasi pendapatan dari retribusi pasar seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Kab. Gresik

No	Tahun	Realisasi
1	2002	Rp. 453.812.100,-
2	2003	Rp. 504.644.950,-
3	2004	Rp. 565.622.100,-
4	2005	Rp. 573.097.100,-
5	2006	Rp. 714.293.775,-

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan pendapatan retribusi pasar dari tahun ke tahun, berarti pendapatan asli daerah dari sektor ini cukup bisa diandalkan. Namun yang menjadi masalah adalah belum pernah ada kajian tentang efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan retribusi pasar, sehingga perlu kiranya dilakukan kajian lebih mendalam tentang masalah ini.

Rumusan Masalah

Seberapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran/ pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata (Bambang, 2003 : 4).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas balas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Kaho (2005 : 171) yang mengemukakan bahwa "Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah". Sedangkan ciri-ciri retribusi daerah menurut Kaho (2005 : 171) adalah

- a. Retribusi dipungut oleh daerah
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah, yang langsung dapat ditunjuk

- c. Retribusi dikenakan kepada siapa yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Jenis-jenis Retribusi Daerah

Disebutkan pada ayat (2) pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu :

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan tertentu

Sedangkan dalam menetapkan jenis-jenis retribusi ke dalam golongan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam UU Nomor 34 tahun 2000 pasal 1 ayat (8) pada perubahan dan tambahan ayat (3) pasal 18 UU Nomor 18 tahun 1997.

Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah uang pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasaran baik tetap maupun tidak tetap di pasar. Sedangkan menurut Perda Kabupaten Daerah tingkat II Gresik Nomor 34 tahun 1997 bahwa, "Retribusi pasar/ retribusi pelayanan pasar adalah retribusi yang dipungut atas fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa kios, los, pelataran dan fasilitas perpasaran yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk transaksi antara penjual dan pembeli".

Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar

Retribusi pasar dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing daerah pemungut. Untuk pemungutan di kota Gresik, dasar hukumnya yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik No 34 tahun 1997 tentang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik No 36 tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 34 tentang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

Sistem Pemungutan Retribusi Pasar

Pemungutan retribusi pasar di dilaksanakan dengan cara harian dan pendapatannya memakai 2 (dua) sistem yang dipadukan, yaitu :

- a. Sistem Bulanan
- b. Sistem Harian

Pengertian Efisiensi

Menurut Sidik (1994), "Efisiensi dapat diukur dengan *cost of collection efficiency ratio* (CCER) yaitu dengan membandingkan *input* atau biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan retribusi dan realisasi penerimaan retribusi. CCER berkisar antara 0,00 – 1,00, semakin mendekati 0,00 efisiensi pengelolaan retribusi pasar semakin tinggi.

Menurut Devas, Nick, 1989, menyatakan bahwa, "Efisiensi adalah perbandingan dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan dalam satu tahun. Semakin kecil maka semakin efisien dimana biaya lebih rendah proporsinya dibandingkan penerimaan yang diperoleh".

Efisiensi menurut Jones dan Pendlebury (1996) adalah suatu perbandingan atau rasio antara output (biaya pemungutan retribusi) dengan input (realisasi penerimaan retribusi). Dengan demikian untuk menghitung efisiensi pengelolaan pemungutan retribusi pasar dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ERP = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Dalam kasus ini, ERP adalah rasio yang menerangkan tentang tingkat efisiensi pengelolaan retribusi pasar. Menurut Abubakar dalam Munir (2004) tentang kriteria penentuan tingkat efisiensi sebagai berikut :

- 1) Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti tidak efisien;
- 2) Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti kurang efisien;
- 3) Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efisien;
- 4) Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti efisien;
- 5) Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti sangat efisien.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Devas, dkk (1989; 279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Jones dan Pendlebury dalam Munir (2004) mengartikan efektivitas dan efisiensi sebagai berikut : Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berhubungan dengan *output*. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara *output* atau keluaran yang dihasilkan terhadap *input* atau masukan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu target kinerja tertentu (outcomes) dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya.

Efektivitas menurut Widodo (2004) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dengan membandingkan antara realisasi pemungutan retribusi terhadap target pemungutan retribusi. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas pengelolaan pemungutan retribusi pasar dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$EfRP = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Dalam kasus ini, Ef.RP adalah rasio yang menerangkan tentang tingkat efektivitas pengelolaan retribusi pasar. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor : 690.900-

327 tahun 1994 dalam Munir (2004), tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan. Penetapan tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar sebagai berikut :

- 1) Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif;
- 2) Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efektif;
- 3) Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif;
- 4) Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti kurang efektif;
- 5) Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

III. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk menunjang analisis data berikut ini disajikan data-data yang berkaitan dengan tujuan menghitung efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan PK5 selama periode pengamatan tahun 2002 – 2006, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar

Keberhasilan dalam pengelolaan retribusi daerah dapat dilihat dari tercapainya suatu target. Proses dalam penetapan suatu target realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Gresik antara lain :

1. Kantor Pengelolaan Pasar dan PK5 melaporkan data potensi pasar yang dikelolanya kepada Bupati dan Tim Anggaran yang ditetapkan.
2. Oleh Tim Anggaran akan diadakan pembahasan untuk menentukan target realisasi penerimaan dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Agar pengelolaan retribusi pasar bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif dalam target realisasi penerimaan retribusi pasar maka perlu melihat faktor-faktor berikut :

1. Ada sebagian kecil pedagang/ pengguna fasilitas pasar yang belum sadar akan kewajiban dalam membayar retribusi.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)/ petugas pemungut yang masih kurang baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Banyak petugas yang pendidikannya setingkat SD dan SMP.
3. Kurangnya koordinasi antara Kantor Pengelolaan Pasar dan PK5 dengan petugas yang berhak memberikan sanksi kepada pedagang yang tidak membayar retribusinya selain itu kurangnya koordinasi ini mungkin disebabkan karena kurang terstrukturanya kerja dari petugas pemungut pasar itu sendiri.
4. Dari kurangnya koordinasi baik dari segi pengamanan dan struktur kerja maka sudah jelas berimbas pada kecekatan Kantor Pengelolaan Pasar dan PK5 dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan fasilitas yang diberikan pada masyarakat yang menggunakannya.

Tabel 2 : Biaya Operasional dan Biaya Petugas Pemungut Retribusi Pasar di Kab. Gresik

Jenis Biaya	2002	2003	2004	2005	2006
A. Biaya Operasional					
1 Pembuatan Karcis	12,800,000	15,135,000	15,312,500	23,575,000	25,375,000
2 Blanko Bulanan Langsung	700,000	900,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
3 Kartu Langganan	1,000,000	1,500,000	1,503,000	1,514,500	1,537,500
4 Surat Perjanjian	700,000	900,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
5 SIM Utama	800,000	1,000,000	1,016,000	1,700,000	1,700,000
6 SIM Biasa	800,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,510,000
7 Blanko Permintaan barang berharga	230,000	230,000	368,000	360,000	360,000
8 Blanko Pengeluaran barang berharga	230,000	230,000	368,000	360,000	360,000
9 Surat Tanda Setoran	-	-	437,500	437,500	437,500
Total biaya operasional	17,260,000	20,895,000	22,255,000	31,197,000	33,530,000
B. Biaya Petugas Pemungut					
1 Pasar Baru (4 Orang)	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,600,000	2,000,000
2 Pasar Kota (2 Orang)	731,979	771,292	977,272	1,389,918	1,629,653
3 Pasar Sidomoro (1 Orang)	350,000	350,000	350,000	400,000	500,000
4 Pasar Giri (1 Orang)	350,000	350,000	350,000	400,000	500,000
5 Pasar Dukun (1 Orang)	350,000	350,000	350,000	400,000	500,000
6 Pasar Sidayu (1 Orang)	350,000	350,000	350,000	400,000	500,000
7 Pasar Driyorejo (1 Orang)	350,000	350,000	350,000	400,000	500,000
Total biaya petugas pemungut/ Bln	3,881,979	3,921,292	4,127,271	4,989,918	6,129,653
Total biaya petugas pemungut/ Th	46,583,748	47,055,504	49,527,260	59,879,016	73,555,836

Sumber : Anggaran tahunan, Kantor Pengelolaan Pasar dan PK5

Tabel 3 :Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Gresik Tahun 2002 - 2006

No	Jenis Retribusi Pelayanan Pasar	2002		2003	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Ret.pelayanan pasar harian	450,000,000	453,812,100	475,000,000	504,644,950
2	Ret.pasar langganan	0	0	0	0
3	Ret.kebersihan pasar	0	0	0	0
4	Balik nama SIM	0	0	0	0
5	Daftar ulang SIM	0	0	0	0
Total		450,000,000	453,812,100	475,000,000	504,644,950

2004		2005		2006	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
172,000,000	426,769,175	197,000,000	268,251,750	197,000,000	307,405,650
254,000,000	139,399,350	278,500,000	243,995,150	278,500,000	345,450,825
58,000,000	24,552,950	58,500,000	41,850,200	58,500,000	48,754,800
6,000,000	2,096,000	5,000,000	12,925,000	5,000,000	3,112,500
10,000,000	5,910,000	11,000,000	6,075,000	11,000,000	9,570,000
500,000,000	598,717,475	550,000,000	573,097,100	550,000,000	714,293,775

Sumber : Kantor Pengelolaan Pasar dan PK5, Anggaran tahun 2002- 2006

Perhitungan Biaya Pemungutan Retribusi Pasar

Tabel 4 : Perhitungan Biaya Pemungutan Retribusi Pasar di Kab. Gresik Tahun 2002 – 2006

Tahun	Biaya Operasional	Biaya Petugas	Biaya Pemungutan
2002	17.260.000	46.583.748	63.843.748
2003	20.895.000	47.055.504	67.950.504
2004	22.255.000	49.527.260	71.782.260
2005	31.197.000	59.879.016	91.076.016
2006	33.530.000	73.555.836	107.085.836

Perhitungan Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar

Tabel 5 : Tingkat Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar di Kab. Gresik Tahun 2002 – 2006

Tahun (1)	Biaya pemungutan (2)	Realisasi retribusi pasar (3)	Efisiensi (2)/(3)
2002	63.843.748	453.812.100	0,14
2003	67.950.504	504.644.950	0,13
2004	71.782.260	598.717.475	0,12
2005	91.076.016	573.097.100	0,16
2006	107.085.836	714.293.775	0,15
Prosentase rata-rata tingkat efisiensi			0,14

Perhitungan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar

Tabel 6 : Tingkat Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kab. Gresik Tahun 2002 – 2006

Tahun (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Efektivitas (3)/(2)
2002	450.000.000	453.812.100	1,01
2003	475.000.000	504.644.950	1,06
2004	500.000.000	598.717.475	1,12
2005	550.000.000	573.097.100	1,04
2006	550.000.000	714.293.775	1,29
Prosentase rata-rata tingkat efektivitas			1,12

Pembahasan**Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar**

Berdasarkan hasil analisis data, ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi dari tahun 2002 – 2006 menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Jika dilihat dari tingkat efisiensi mulai tahun 2002 – 2006, didapat prosentase rata-rata tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar sebesar 0,14 atau 14%, maka hal ini dikategorikan tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah sangat efisien.

Dari pembahasan diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar semakin efisien jika realisasi penerimaan retribusi pasar lebih besar dibanding biaya pemungutan yang dikeluarkan sampai mencapai lebih kecil dari 1 atau 100%.

Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar

Berdasarkan hasil analisis data, ditunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari tahun 2002 – 2006 menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Jika dilihat dari tingkat efektivitas mulai tahun 2002 – 2006, didapat prosentase rata-rata tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar sebesar 1,12 atau 112%, maka hal ini dikategorikan tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah sangat efektif.

Dari pembahasan diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar semakin efektif jika realisasi penerimaan retribusi pasar lebih besar dibanding target yang ditentukan sampai mencapai lebih besar dari 1 atau 100%.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

1. Tingkat efisiensi dari pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah mengalami keadaan yang fluktuatif dengan rerata pertahunnya adalah 0,14 atau 14% yang menunjukkan sangat efisien.
2. Tingkat efektivitas dari pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah mengalami keadaan yang fluktuatif dengan rerata pertahunnya adalah 1,11 atau 111% yang menunjukkan sangat efektif

Saran

Upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan retribusi pasar secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, antara lain :

1. Intensifikasi

Intensifikasi berarti upaya peningkatan retribusi pasar dari sumber/ obyek retribusi yang selama ini telah dikelola. Upaya-upaya tersebut adalah :

- a. Perubahan sistem kerja dari petugas pemungut dan Kantor Pengelolaan Pasar dan PK5 agar terjalin yang namanya koordinasi yang baik yaitu dengan melakukan rotasi terhadap petugas pemungut dari pasar satu ke pasar yang lain (fungsi kontrol), sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan pasar dapat cepat diatasi.
- b. Meninjau kembali prosedur penetapan besarnya target realisasi retribusi pasar agar disesuaikan dengan potensi penerimaan atau target realisasi dibuat melebihi potensi penerimaannya, karena dengan lebih rendahnya target realisasi dari potensi maka Kantor pengelolaan pasar dan PK5 akan mudah cenderung mengejar target daripada melakukan usaha pengoptimalan penerimaan retribusi pasar.
- c. Memperbaiki anggaran dalam menetapkan target penerimaan retribusi pasar agar dalam menentukan efektivitasnya tidak terpacu pada target penerimaan retribusi pasar pada tahun sebelumnya dengan melakukan perhitungan regresi, dimana tahun (faktor dependen) dan realisasi (faktor independen).
- d. Menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan retribusi agar dapat dilakukan lebih efektif. Upaya ini termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pengelola/ pemungut dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan baik melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal dengan memberikan kesempatan pada aparat pengelola untuk melanjutkan pendidikan baik melalui tugas/ izin belajar. Sedangkan pendidikan nonformal dengan memberikan pendidikan dan latihan (diklat) tertentu.
- e. Untuk mengefisienkan pemungutan retribusi pasar di dalam poin biaya operasional agar ditambah dengan biaya penjagaan/ pengamanan dan asuransi, dimana pada sekarang ini banyak terjadi kebakaran dalam pasar.
- f. Mengadakan kegiatan pemantauan/ memonitor petugas dalam menjalankan tugas pemungutan di pasar-pasar dan menambah jumlah petugas pemungut. Pengawasan ini perlu dilakukan untuk mengontrol seberapa efisien kinerja dari petugas pemungut.
- g. Mengadakan sosialisasi kepada subyek retribusi/ pengguna fasilitas pasar supaya mengerti akan hak dan kewajibannya terutama dalam membayar retribusi.
- h. Agar pemerintah daerah kabupaten Gresik melakukan usaha penagihan terhadap retribusi terutang dari subyek retribusi secara intensif serta memberlakukan secara tegas sanksi terhadap subyek pengguna yang tidak mau melakukan kewajiban membayar retribusi sesuai aturan dan prosedur yang ada dalam peraturan daerah.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi dalam retribusi pasar berarti penggalan sumber-sumber/potensi retribusi yang belum dikelola dan ditetapkan menjadi obyek penerimaan retribusi yang baru. Upaya-upaya tersebut adalah memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana pasar, yaitu pembangunan fasilitas pasar yang memadai, hal ini akan sedikit banyak akan berpengaruh pada kenyamanan para pengguna pasar itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Fitriana. 2003. **Analisis Retribusi Pasar sebagai Salah Satu Sumber PAD di Kabupaten Sidoarjo (1997 – 2002)**. Surabaya:UNAIR.
- Bambang Prakosa, Kesit. 2003. **Pajak dan Retribusi Daerah**. Yogyakarta:UIN Press
- Bilas, Richard A. 1984. **Teori Mikro Ekonomi**. Edisi Kedua. Jakarta:Erlangga.
- BPS. 2003. **Gresik dalam Angka**.
- Devas, Nick. 1989. **Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, terjemahan Aminullah**. Jakarta:UI Pres.
- Dinas Pendapatan Daerah. 2005. **Perhitungan APBD Kabupaten Gresik tahun 2002 – 2005**
- Gie, The Liang. 1997. **Ensiklopedia Administrasi**. Jakarta:Gunung Agung.
- Jones, Rowan and Pendlebury, Maurice. 1996. **Public Sector Accounting**. London: Pitman Publishing.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. **Prospek Otonomi Daerah di Negara RI:Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah**. Yogyakarta:Rajawali Pers.
- _____ . 1998. **Prospek Otonomi Daerah di Negara RI:Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhinya**. Yogyakarta:Rajawali Pers.
- Mahardika, Putu. 2003. **Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar (Studi kasus pada Pasar Pemerintah daerah Kabupaten Sleman)**. Universitas Brawijaya. Lintas Ekonomi vol XX No 2 (Juli) hal 204 – 220.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta:Andi Yogyakarta.
- Moleong, J Lexy. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung:Rosdakarya.
- Munir, Dasril. 2004. **Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta:YPAPI.
- Muqodim. 2000. **Perpajakan**. Yogyakarta : UIN Press.
- Nasution, Agus Salim, Soewondo dan Gunadi. 1994. **Pajak dan Retribusi Daerah**. Jakarta:Universitas Terbuka.
- Nazir, Moh. 2005. **Metodologi Penelitian**. Darussalam:Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik No 34 tahun 1997 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
- Putong, Iskandar. 2002. **Pengantar Ekonomi Mikro & Makro**. Edisi kedua. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Rosyidi, Suherman. 2003. **Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro**. Yogyakarta:R Grafindo

- Sadnaweke, Okdwara. 2000. **Retribusi Pasar sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kabupaten Tingkat II Ngawi**. Surabaya:UNAIR
- Samuelson, Paul A dan William B Nordhaus. 1994. **Makro Ekonomi. Edisi XIV**. Jakarta:Erlangga.
- Suparmoko, M. 2001. **Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Edisi Pertama. Purwokerto:Andi Yogyakarta.
- _____. 2000. **Keuangan Negara**. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto. 1991. **Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)**. Cetakan Kedua. Yogyakarta:Liberty.
- Syamsi, Ibnu. 1993. **Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara**. Jakarta:Bima Aksara.
- UU RI No 32 tahun 2004 dan UU RI No 33 tahun 2004 tentang Perubahan Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dari Pertanggungjawaban Vertikal ke Pertanggungjawaban Horisontal.
- UU RI No 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU RI No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU RI No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU RI No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU RI No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widodo. 2004. **Analisa Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali Jawa Tengah**. Bunga Rampai : Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi.